

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Desa-Desa Di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor

Factors Influencing The Prevention Of Fraud In Village Fund Management Case Studies On Villages In Caringin Sub-District Bogor Regency

Dede Sutisna¹, Ade Budi Setiawan², Joko Marsudi³

^{1,2,3}Universitas Djuanda Bogor, Jln. Tol Ciawi No1, Ciawi-Bogor, Jawa Barat
dedesutisna445@gmail.com

Submitted: 30-04-2024

Accepted: 06-06-2024

Published: 21-06-2024

Abstrak: Tahun demi tahun, nilai anggaran desa terus meningkat. Sayangnya, tren peningkatan tersebut juga dibarengi dengan peningkatan kasus kecurangan dalam penanganan dana desa. Tujuan penelitian ini adalah mengujipengaruh kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dalam mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk penelitian ini. Populasi penelitian terdiri dari perangkat desa dari 12 desa di Kecamatan Caringin. Penentuan sampel dilakukan dengan metode simple random sampling dengan menggunakan rumus Slovin. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 127 perangkat desa yang dilengkapi dengan wawancara untuk lebih memperkuat data penelitian. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 25. Temuan penelitian menunjukkan kompetensi sumber daya manusia kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system* secara parsial berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan besaran pengaruh atau nilai koefisien kompetensi sumber daya manusia sebesar 0,502, kepemimpinan teladan sebesar 0,094, sistem pengendalian internal sebesar 0,124 dan *whistleblowing system* sebesar 0,163. Semua variabel dalam penelitian ini juga berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan besaran kontribusi sebesar 82,8% yang berarti tingkat pengaruhnya sangat kuat.

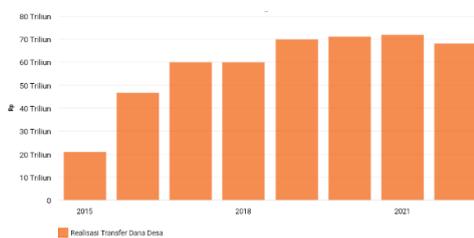
Kata kunci: pencegahan kecurangan, kompetensi sumber daya manusia, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system*

Abstract: Year after year, the value of the village budget continues to increase. Unfortunately, this increasing trend is also accompanied by an increase in cases of fraud in the handling of village funds. The aim of this research is to examine the influence of HR competency, exemplary leadership, internal control systems, and violation reporting systems (*whistleblowing system*) in preventing fraud in managing village funds. A quantitative approach was used for this research. The research population consisted of village officials from 12 villages in Caringin District. Sample determination was carried out using a simple random sampling method using the Slovin formula. Data collection was carried out by distributing questionnaires to 127 village officials accompanied by interviews to further strengthen the research data. Data analysis uses multiple linear regression analysis with SPSS 25 software. Research findings show that human resource competency, exemplary leadership, internal control systems, and *whistleblowing system* partially influence the prevention of fraud in managing village funds with a magnitude of influence or human resource competency coefficient value of 0.502, exemplary leadership at 0.094, internal control system at 0.124 and *whistleblowing system* at 0.163. All variables in this research also simultaneously influence the prevention of fraud in village fund management with a contribution amount of 82.8%, which means the level of influence is very strong.

Keywords: fraud prevention, human resource competency, exemplary leadership, internal control system, *whistleblowing system*

PENDAHULUAN

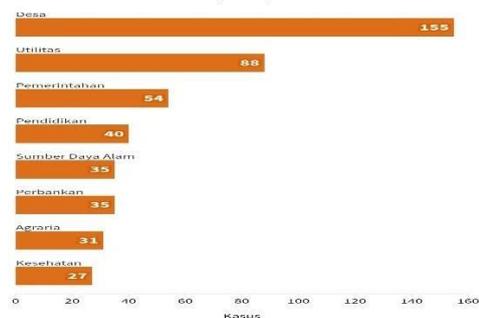
Desa merupakan unit terkecil didalam pemerintahan daerah. UU No. 6 Undang-Undang Tahun 2014 yang biasa dikenal dengan UU Desa mempunyai peranan penting dalam mendukung berbagai tanggung jawab dan tugas desa. UU ini secara khusus mengatur alokasi dana desa, memastikan setiap desa menerima anggaran tahunan. Dana desa sebagaimana dimaksud dalam UU desa yakni dana dari APBN dan diperuntukkan bagi pembangunan dan penyelenggaraan desa. APBD kabupaten atau kota memfasilitasi transfer dana desa guna membiayai berbagai aspek, antara lain penyelenggaraan pemerintahan, proyek pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lainnya. Dana desa dibagi menjadi dua alokasi utama, yaitu 30% dialokasikan untuk operasional pemerintahan desa, yang meliputi pembiayaan operasional desa, menutupi biaya operasional tim penyelenggara ADD, dan menunjang biaya operasional BPD. Sisanya sebesar 70% diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat, dengan fokus utama pada pengembangan sarana prasarana perekonomian di desa. Alokasi ini juga mendukung dibidang pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan keuangan kepada berbagai lembaga masyarakat desa, seperti BUMDes dan kelompok usaha lainnya berdasarkan potensi ekonomi desa. Selain itu, dukungan finansial juga diberikan kepada lembaga-lembaga di desa, antara lain LPMD, RW, RT, PKK dan Kesejahteraan Keluarga, Linmas, Karang Taruna dan lain-lain (Kementerian Keuangan, 2021)



Gambar 1. Realisasi Transfer Dana Desa Per Tahun 2015-2022

Berdasarkan laporan keuangan LKPP pemerintah pusat, transfer dana desa secara konsisten meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2021, meskipun tingkat pertumbuhannya bervariasi dari waktu ke waktu.

Namun, diperkirakan terdapat penurunan 5,5% pada tahun 2021 yakni realisasi transfer dana desa tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp. 67,9 triliun. Meskipun secara tahunan mengalami penurunan, realisasi kumulatif dana desa mengalami lonjakan signifikan sebesar 227%. Pemerintah mengalokasikan 70 triliun untuk transfer dana desa pada APBN 2023. Pada Juli 2023, Rapat Panitia Kerja Revisi UU Desa DPR memberikan persetujuan kenaikan alokasi anggaran dana desa dalam APBN sebesar 20%. Dengan peningkatan tersebut, setiap desa dapat menerima dana transfer hingga Rp. 2 miliar/tahun. Meski mayoritas fraksi di DPR sudah mencapai kesepakatan, namun poin-poin revisi UU Desa masih menunggu pengesahan dan akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah (Ahdiat, 2023).



Gambar 2. Sektor Dengan Kasus Korupsi Terbanyak Di Indonesia Tahun 2022

Sayangnya, kenaikan nilai anggaran dana desa diikuti juga dengan meningkatnya kasus korupsi didalam pengelolaan dana desa. Dari gambar 2. diatas dapat dilihat bahwa, pada tahun 2022 kasus korupsi paling banyak terjadi disektor desa. Dari laporan ICW (*Indonesia Corruption Watch*), total ada 155 kasus korupsi di sektor desa pada tahun lalu dan melibatkan 252 tersangka. Jumlah ini mencakup sekitar 26,77% dari seluruh kasus korupsi yang ditangani penegak hukum pada tahun 2022. Angka ini hanya mengalami sedikit peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang mencatat total 154 kasus korupsi di sektor desa. Secara spesifik, dari 155 kasus tersebut, 133 kasus terkait dengan dana desa, sedangkan 22 kasus lainnya terkait dengan pendapatan desa (DataIndonesia.id, 2023)

Meningkatnya kasus kecurangan pengelolaan dana desa secara terus menerus mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan upaya pencegahan sehingga angka kasus korupsi di sektor desa ini tidak meningkat dan anggaran dana desa yang disalurkan dapat digunakan secara

efektif. Kecurangan mencakup tindakan yang disengaja dan sembrono yang berupaya mendapatkan keuntungan secara tidak sah melalui cara-cara yang menipu. Tindakan-tindakan ini, biasanya tanpa kekerasan dan dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi, mempunyai dampak buruk terhadap pihak-pihak lain yang terlibat (Irianto & Novianti, 2019).

Untuk mencegah kecurangan secara efektif, penting untuk memperhatikan tiga faktor utama yakni manusia, sistem, dan lingkungan, untuk memastikan cakupan yang komprehensif. Faktor manusia merupakan kunci utama didalam pengelolaan dana desa didalam menjalankan sistem dan menciptakan lingkungan yang positif. Kemudian Faktor sistem yang baik dan terintegrasi akan menciptakan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien. Faktor lingkungan juga merupakan hal yang harus diperhatikan agar aspek manusia dan sistem bisa berjalan dengan efektif guna mencapai tujuan dari dianggarkannya dana desa. Langkah pencegahan terhadap kecurangan yang dapat dilakukan berdasarkan ketiga faktor itu diantaranya dengan membangun integritas melalui peningkatan kualitas SDM mempunyai kompetensi yang mumpuni, menciptakan kepemimpinan teladan, mengembangkan sistem pengendalian internal yang baik dan mengembangkan *whistleblowing systems* (Irianto & Novianti, 2019).

Setiap individu di pemerintahan harus memiliki kompetensi yang mumpuni agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai aparatur sipil negara berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam melaksanakan tugas dan jabatannya, sehingga aparatur tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Kompetensi ini sangat diperlukan agar aparatur sipil negara melaksanakan tugas tanggung jawabnya secara profesional, efektif, efisien. Kecakapan aparat desa sangat penting dalam menjamin keberhasilan administrasi dan penyaluran dana desa, sehingga mengurangi risiko potensi kecurangan dalam penanganan dana tersebut (Dewi dkk, 2022). Kompetensi yang dimiliki setiap aparatur perlu untuk selalu dikembangkan. Hal itu guna menjaga kompetensi yang dimiliki aparatur agar tidak hilang dan tertinggal dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang ada (Setiadiputra, 2019). Hasil penelitian Hamidah (2020), Islamiyah, dkk (2020) Wahyudi, dkk (2021) dan Dewi, dkk (2022) menyatakan bahwa kompetensi

sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Selain dengan meningkatkan kualitas SDM berkompeten, pencegahan kecurangan juga dapat dilakukan dengan menciptakan kepemimpinan teladan.

Esensi kepemimpinan terletak pada kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap individu, bawahan, atau kelompok, serta keterampilan untuk membimbing dan membentuk perilaku bawahan atau kelompok tersebut (Hutahean, 2021:1). Kepemimpinan merupakan proses dimana seorang pemimpin berinteraksi dengan orang lain dalam organisasi (Basuki, 2021). Kepemimpinan yang menjadi teladan positif dan mengedepankan kebijakan yang mendorong lingkungan kerja yang kondusif dapat menginspirasi individu dalam organisasi melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya dengan tekun, sekaligus mencegah perilaku yang tidak pantas (Irianto & Novianti, 2019:83). Membentuk budaya yang menumbuhkan kejujuran, keterbukaan, salingmembantu, dan mendukung dalam membangun lingkungan kerja yang positif. Lingkungan pekerjaan yang baik serta saling menghargai dapat meningkatkan keterikatan kerja karyawan atau aparatur (Pranitasari, Setianingsih, Prastuti, Hermastut, & Saodah, 2022). Nilai-nilai etika yang ditunjukkan pemimpin mempengaruhi perilaku dan rasa tanggung jawab bawahannya, karena bawahan sering kali meniru perilaku yang ditunjukkan oleh atasannya. Penting bagi para pemimpin memberikan contoh terpuji guna menanamkan perilaku etis pada anggota timnya. Tentunya dengan perilaku etis yang ada akan dapat meminimalisir tindakan kecurangan atau hal-hal diluar norma yang berlaku. Hasil penelitian Mayer, dkk (2010) dan Jhonson, dkk (2017) menyatakan bahwa pemimpin yang etis akan mencegah *fraud*. Lalu Domili (2021) menyatakan bahwa akhlak pimpinan berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi mendefinisikan Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai yang mana tujuannya adalah untuk menanamkan keyakinan terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menjamin

efektivitas serta efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan kekayaan negara, kepatuhan akan peraturan perundang-undangan. Dengan menerapkan langkah-langkah pengendalian internal yang kuat, secara efektif mencegah kecurangan dan meminimalisir terjadinya kerugian. Pengendalian intern yang efektif dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya *fraud*. Hasil penelitian Shafira (2021) dan Wahyudi, dkk (2021) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Pengungkapan terhadap kecurangan juga tentunya harus terus dilakukan dalam upaya memerangi praktik kecurangan yang terjadi didalam pengelolaan dana desa salah satunya melalui mekanisme pelaporan pelanggaran. Karyawan atau pemimpin dalam suatu organisasi mungkin terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum, mengungkapkan perilaku tidak etis atau tidak bermoral, atau menyebabkan kerugian bagi organisasi dan pemangku kepentingannya. Tindakan-tindakan tersebut dilaporkan kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain, yang mempunyai kewenangan untuk menangani pelanggaran-pelanggaran tersebut (Tunakotta dalam Islamiyah, dkk, 2020). Dari hasil survei *fraud* yang dilakukan ACFE tahun 2022, diketahui bahwa media terbesar terungkapnya *fraud* adalah melalui tip atau pengaduan yaitu sebesar 42% dimana laporan tersebut mayoritas dari karyawan perusahaan/institusi sebesar 50% (ACFE, 2022). Sangat penting untuk membangun mekanisme yang memungkinkan pelapor melaporkan tuduhan atau kejadian penipuan tanpa rasa takut akan pembalasan dari pihak yang dituduh. Hasil penelitian Islamiyyah, dkk (2020), Wahyudi, dkk (2021) dan Yufitrianisa, dkk (2022) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Dari uraian latar belakang diatas dapat diketahui bahwa pentingnya upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa agar dana desa yang nilai anggarannya cukup besar dapat dikelola dengan efektif dalam rangka mensejahterakan masyarakat di desa.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak atau pengaruh kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* dalam mencegah terjadinya kecurangan pengelolaan dana desa di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian yang efektif dan efisien bergantung pada desain penelitian yang terdefinisi dengan baik, yang berfungsi sebagai kerangka panduan (Abdullah, 2015:29). Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif metode survei, fokus pada rumusan masalah asosiatif untuk membangun hubungan sebab akibat. Penelitian kuantitatif, yang didasarkan pada filosofi positivis, berupaya menguji populasi atau mengumpulkan data instrumen penelitian dan melakukan analisis statistik untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2022:8). Rumusan masalah asosiatif melibatkan eksplorasi hubungan dua variabel ataupun lebih (Sugiyono, 2022:35). Dalam penelitian ini hubungan asosiatif yang diteliti bersifat kausal, artinya mengandung sebab dan akibat. Akibatnya, terdapat variabel independen serta variabel dependen dalam hubungan ini (Sugiyono, 2022:37). Dalam penelitian ini, pendekatan asosiatif kausal digunakan menguji pengaruh kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* akan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Populasi penelitian yakni perangkat desa dari berbagai desa di Kecamatan Caringin antara lain Desa Pasir Buncir, Desa Ciderum, Desa Ciherang Pondok, Desa Cinagara, Desa Caringin Desa Cimande, Desa Lemah Duhur Desa Pancawati, Pasir Muncang, Desa Cimande Hilir Desa Muara Jaya dan Desa Tangkil. Untuk melakukan penelitian ini, digunakan metode pengambilan sampel yang dikenal dengan *simple random sampling*. Selain itu, ukuran sampel untuk penelitian ini dihitung menggunakan rumus Slovin, dengan memperhitungkan margin kesalahan sebesar 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Sebanyak 127 kuesioner yang disebarakan mewakili 100% penerima yang dituju. Dari jumlah tersebut, 4 kuesioner atau setara dengan 3% tidak dikembalikan. Namun sebagian besar kuesioner, yaitu 123 atau 97%, berhasil dikembalikan. Di antara kuesioner yang dikembalikan, hanya 3 atau 2%, yang tidak diproses sebab informasi yang tidak lengkap. Jumlah kuesioner yang digunakan analisis data berjumlah 120 atau mewakili 95% kuesioner yang disebarakan.

Karakteristik Responden

Penelitian ini diketahui mayoritas

responden yakni laki-laki sebesar 77% (93 orang). Sedangkan responden perempuan berjumlah 23% (27 orang). Hal ini menunjukkan adanya dominasi laki-laki dalam perangkat desa di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Untuk responden dengan kelompok umur terbanyak pada rentang 41-50 tahun yaitu sebesar 35% (42 orang), responden berusia 31-40 tahun sebesar 34% (41 orang), kelompok usia 20-30 tahun berjumlah 18% (21 orang) dan kelompok usia di atas 50 tahun berjumlah 13% (16 orang). Pada kategori masa kerja perangkat desa, mayoritas telah menjabat lebih dari 4 tahun, dengan 41% (49 orang) termasuk dalam kelompok ini. Kemudian diikuti aparatur desa dengan masa kerja pada rentang 3-4 tahun sebesar 38% (46 orang), aparatur desa dengan masa kerja pada rentang 2-3 tahun sebesar 19% (23 orang) dan aparatur desa dengan rentang masa kerja berada pada 1-2 tahun sebesar 2% (2 orang).

Pengujian Instrumen
Uji Validitas

Berikut ini merupakan hasil pengujian tiap butir pernyataan dalam instrumen penelitian yang berjumlah 6 pernyataan untuk setiap variabel yaitu variabel kompetensi SDM (X1), kepemimpinan teladan (X2), Sistem pengendalian internal (X3) *whistleblowing system* (X4) dan pencegahan kecurangan (Y).

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r _{hitung}	r _{kritis}	Keterangan
Kompetensi SDM	X1.1	0,763	0,3	Valid
	X1.2	0,840	0,3	Valid
	X1.3	0,713	0,3	Valid
	X1.4	0,666	0,3	Valid
	X1.5	0,739	0,3	Valid
Kepemimpinan Teladan	X1.6	0,683	0,3	Valid
	X2.1	0,516	0,3	Valid
	X2.2	0,651	0,3	Valid
	X2.3	0,814	0,3	Valid
	X2.4	0,822	0,3	Valid
	X2.5	0,847	0,3	Valid
Sistem Pengendalian Internal	X2.6	0,571	0,3	Valid
	X3.1	0,624	0,3	Valid
	X3.2	0,648	0,3	Valid
	X3.3	0,797	0,3	Valid
<i>Whistleblowing System</i>	X3.4	0,747	0,3	Valid
	X3.5	0,794	0,3	Valid
	X3.6	0,674	0,3	Valid
	X4.1	0,662	0,3	Valid
	X4.2	0,749	0,3	Valid
	X4.3	0,785	0,3	Valid
Pencegahan Kecurangan	X4.4	0,806	0,3	Valid
	X4.5	0,701	0,3	Valid
	X4.6	0,486	0,3	Valid

Pencegahan	Y1	0,526	0,3	Valid
Kecurangan	Y2	0,519	0,3	Valid
	Y3	0,600	0,3	Valid
	Y4	0,621	0,3	Valid
	Y5	0,703	0,3	Valid
	Y6	0,593	0,3	Valid

Setelah menganalisis data pada tabel 1, terlihat bahwa seluruh nilai r hitung berada di atas 0,3. menunjukkan variabel-variabel yaitu kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, Sistem Pengendalian Internal, sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), dan pencegahan kecurangan (Y) dinyatakan valid. Oleh karena itu, item-item yang disebutkan dalam pernyataan ini dianggap sesuai untuk tujuan penelitian lebih lanjut.

Uji Reliabilitas

Tujuan uji reliabilitas ini adalah mengetahui tingkat kepercayaan dan ketergantungan suatu alat ukur.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach's Alpha	r _{kritis}	Keterangan
1	Kompetensi SDM	0,829	0,6	Reliabel
2	Kepemimpinan Teladan	0,798	0,6	Reliabel
3	Sistem Pengendalian Internal	0,809	0,6	Reliabel
4	<i>Whistleblowing System</i>	0,832	0,6	Reliabel
5	Pencegahan Kecurangan	0,665	0,6	Reliabel

Data yang tersaji pada tabel menunjukkan nilai Cronbach's alpha variabel kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system* dan pencegahan kecurangan (Y) semuanya melampaui nilai Cronbach's alpha yaitu nilai kritis 0,6. Semua variabel dapat dianggap reliabel serta dipercaya.

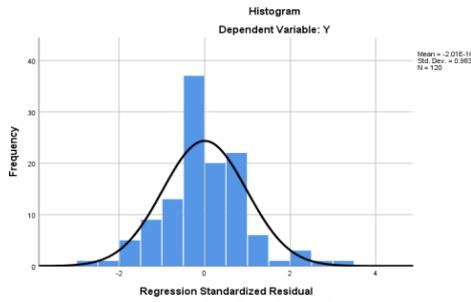
Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

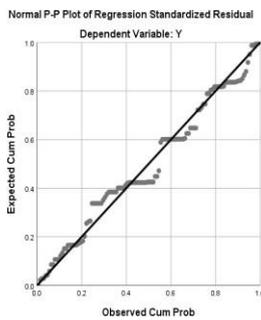
Uji Normalitas

Dalam model regresi, uji normalitas guna menguji apakah variabel dependen yaitu pencegahan penyelewengan dana desa serta variabel independen antara lain kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system* menunjukkan hasil

yang baik atau berdistribusi normal.



Gambar 3. Grafik Histogram



Gambar 4. Grafik Normal P-Plot

Setelah menganalisis grafik histogram Gambar 3, terlihat grafik menunjukkan kurva berbentuk lonceng yang menunjukkan pola sebaran normal. Selain itu, jika dilihat pada gambar p-plot Gambar 4, terlihat titik-titik data tersebar disekitar garis diagonal, sejajar dengan pola sebaran garis jika mempertimbangkan kedua grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Oleh karena itu, disimpulkan data berdistribusi normal dan berhasil lolos uji asumsi normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji One Kolmogorov Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.73215468
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.101
	Negative	-.093
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.004 ^c

Exact Sig. (2-tailed)	.162
Point Probability	.000

Setelah menganalisis data tabel 2, uji one-sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan nilai sig. 0,162. Nilai tersebut melampaui ambang batas 0,05 sehingga disimpulkan data menunjukkan distribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Untuk menguji adanya korelasi antara variabel kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing sysem t* dalam model regresi, dilakukan uji multikolinearitas.

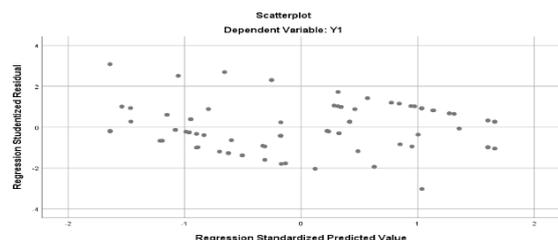
Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

No	Variabel	Tolerance	VIF
1	Kompetensi SDM	0,350	2,859
2	Kepemimpinan Teladan	0,639	1,566
3	Sistem Pengendalian Internal	0,275	3,634
4	Whistleblowing System	0,657	1,523

Setelah dicermati data pada tabel 4.16, terlihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) pada variabel kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system* semuanya berada di bawah 10 ($VIF < 10$). Selain itu, nilai toleransi untuk variabel-variabel tersebut berada di atas 0,10 (toleransi $> 0,10$). Disimpulkan dengan yakin model regresi tidak menunjukkan tanda- tanda multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah variasi varians antar observasi yang berbeda dalam model regresi.



Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 5, titik-titik tersebut tersebar secara acak serta tidak menunjukkan pola terlihat. Selain itu, titik-titik tersebut didistribusikan di atas dan dibawah tanda nol sumbu Y. Disimpulkan tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas model regresi, sehingga diaktakan valid penggu-naannya dalam memprediksi pencegahan kecu-rangan dana desa. Prediktor model ini antara lain kompetensi sumber daya manusia, kepemim-pinan teladan, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing system*.

Analisis Data

Beberapa analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi analisis regresi linear berganda, analiasis korelasi berganda dan analisis koefisien determinasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tujuan dari analisis regresi linier berganda ini adalah menilai besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, juga berupaya untuk mengetahui apakah terdapat perubahan pada nilai-nilai kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	3.103	1.092			2.842	.005
Kompetensi SDM	.502	.055	.597		9.127	.000
Kepemimpinan Teladan	.094	.041	.112		2.306	.023
Sistem Pengendalian Internal	.124	.062	.148		2.006	.047
<i>Whistleblowing System</i>	.163	.039	.198		4.138	.000

a. Dependent Variable : Pencegahan Kecurangan
 Sumber : output SPSS 25, 2024

Pada tabel 5, diperoleh nilai persamaan regresi yaitu $Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \epsilon$

$$Y = 3,103 + 0,502 X_1 + 0,094 X_2 + 0,124 X_3 + 0,163 X_4 + e$$

Berikut ini merupakan interpretasi dari regresi diatas, dijelaskan yaitu:

- a. Nilai sebesar 3,103 bernilai konstan ketika variabel pencegahan kecurangan dana desa tidak dipengaruhi oleh variabel lain seperti kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Jika variabel independen bernilai 0 maka nilai pencegahan kecurangan dana desa sebesar 3,103.
- b. Variabel pencegahan kecurangan dana desa

mengalami peningkatan nilai koefisien regresi sebesar 0,502.

- c. Nilai Variabel pencegahan kecurangan dana desa mengalami kenaikan sebesar 0,094 karena adanya nilai koefisien regresi
- d. Nilai koefisien regresi variabel terkait pencegahan penyelewengan dana desa sebesar 0,124
- e. Variabel pencegahan kecurangan dana desa menunjukkan peningkatan nilai koefisien regresi yang signifikan yaitu sebesar 0,162

Analisis Koefisien Korelasi Berganda

Tujuan dilakukannya analisis koefisien korelasi berganda adalah untuk menilai sejauh mana kompetensi sumber daya manusia, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, *whistleblowing system* secara bersama-sama berkontribusi terhadap pencegahan kecurangan dana desa di desa-desa Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Tabel 6 Hasil Uji Korelasi Berganda Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.910 ^a	.828	.822	.745

Berdasarkan tabel yang tersedia, nilai R 0,910 berada dalam interval R 0,800-1,000, yang menunjukkan tingkat kekuatan hubungan yang sangat signifikan. Hal ini menunjukkan pengaruh yang kuat antara variabel kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, sistem pelaporan pelanggaran dalam mencegah penyelewengan dana desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat nilai kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* sehingga meningkatkan pencegahan kecurangan dana desa.

Analisis Koefisien Detrminasi

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui presentase perubahan variabel pencegahan kecurangan dana desa (Y) yang disebabkan oleh variabel kompetensi sumber daya manusia (X₁), kepemimpinan teladan (X₂), sistem pengendalian internal (X₃) dan *whistleblowing system* (X₄). Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel 6,

nilai R² sebesar 0,828 ataupun setara dengan 82,8%. Variabel X₁, X₂, X₃, serta X₄ secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 82,8% akan efektivitas pencegahan penyelewengan dana desa. Selebihnya 17,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Standar error estimasi tersebut berfungsi sebagai ukuran keakuratan model regresi dalam memprediksi nilai Y. Dalam hal ini, hasil regresi menghasilkan nilai sebesar 0,745 satuan yang menandakan banyaknya kesalahan dalam memprediksi pencegahan penyelewengan dana desa.

Pengujian Hipotesis

Proses pengujian hipotesis melibatkan pemeriksaan dugaan yang dirumuskan atau solusi sementara terhadap masalah. Prosedur pengujian ini terdiri dari dua pengujian yaitu uji F serta uji T. Uji F bertujuan mengevaluasi dampak keseluruhan variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji T dilakukan menilai pengaruh spesifik dan parsial variabel independen akan variabel dependen.

Uji F

Untuk menilai pengaruh gabungan kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan pelanggaran dalam mencegah *fraud* dana desa, dilakukan uji statistik F. Kriteria pengambilan keputusan uji F ini yakni apabila nilai F_{hitung} (F_{hitung}) melebihi nilai F kritis (F_{tabel}), maka hipotesis nol (H₀) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a). Sebaliknya jika nilai F_{hitung} lebih rendah dari nilai F_{kritis} hipotesis nol diterima serta hipotesis alternatif ditolak.

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	306.600	4	76.650	138.184	.000 ^b
Residual	63.790	115	.555		
Total	370.390	119			

a. Dependent Variable: Pencegahan Kecurangan
 b. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, Kepemimpinan teladan, kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal

Dengan menganalisis data pada tabel 7, hasil pengujian menghasilkan nilai F_{hitung} 138,184, sedangkan nilai F_{tabel} 2,45. Jika dibandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel}, diperoleh F_{hitung} > F_{tabel} (138,184 > 2,45), nilai sig. 0,000 < 0,05. Akibatnya H₀ ditolak serta H_a diterima. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan

gabungan faktor kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) mempunyai pengaruh simultan terhadap pencegahan kecurangan dana desa di desa-desa Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Uji T

Untuk menilai pengaruh kompetensi SDM, keteladanan kepemimpinan, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan pelanggaran dalam mencegah kecurangan dana desa, dilakukan uji T. Dalam uji T ini kriteria pengambilan keputusan didasarkan pada apakah nilai t_{hitung} melebihi nilai t_{tabel}. Bila nilai t_{hitung} melebihi t_{tabel}, berarti ditolak (H₀) dan diterimanya (H_a). Sebaliknya jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka menunjukkan diterimanya (H₀) dan ditolaknya (H_a).

Tabel 8. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	3.103	1.092		2.842	.005
Kompetensi SDM	.502	.055	.597	9.127	.000
Kepemimpinan Teladan	.094	.041	.112	2.306	.023
Sistem Pengendalian Internal	.124	.062	.148	2.006	.047
Whistleblowing System	.163	.039	.198	4.138	.000

a. Dependent Variable : Pencegahan Kecurangan

Dari tabel 8 diatas diketahui bahwa :

a. Uji t Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia

Uji t dilakukan menganalisis pengaruh kompetensi SDM terhadap pencegahan kecurangan dana desa di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor. Nilai t_{hitung} yang diperoleh 9,127, nilai t_{tabel} 1,98. Hal ini menunjukkan nilai t_{hitung} melebihi nilai t_{tabel} (9,127 > 1,98). Selain itu, tingkat sig. ditemukan kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05), yang menyebabkan penolakan H₀ dan penerimaan H_a. Oleh karena itu, disimpulkan kompetensi SDM memiliki pengaruh positif serta sig. secara parsial akan pencegahan kecurangan dana desa di Kecamatan Caringin Kab. Bogor.

b. Uji t Variabel Kepemimpinan Teladan

Hasil pengujian uji t variabel kepemimpinan teladan diperoleh nilai t_{hitung} 2,306 sedangkan nilai t_{tabel} 1,98 yang berarti nilai t_{hitung} > nilai t_{tabel} (2,306 > 1,98). Ditinjau dari tingkat signifikansinya diperoleh nilai (0,023) yang kurang dari 0,05 yang menunjukkan penolakan H₀ dan penerimaan H_a. Temuan ini menunjukkan bahwa kepemimpinan keteladanan mempunyai pengaruh positif secara parsial serta signifikan terhadap pencegahan

kecurangan dana desa di desa- desa Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

c. Uji t Variabel Sistem Pengendalian Internal

Setelah dilakukan uji t terhadap variabel sistem pengendalian internal diperoleh nilai thitung 2,006 melampaui nilai ttabel 1,98 ($2,006 > 1,98$). Selain itu, tingkat sig. ditentukan $< 0,05$ ($0,047 < 0,05$), menyebabkan penolakan H_0 dan penerimaan H_a . Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berperan positif dan signifikan secara parsial dalam mencegah kecurangan dana desa di desa- desa yang terletak di Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

d. Uji t Variabel Whistleblowig System

Dalam menganalisis data variabel sistem pelaporan pelanggaran, uji t menghasilkan nilai thitung 4,138 melampaui nilai ttabel 1,98 ($4,138 > 1,98$). Selain itu, tingkat sig. $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) menyebabkan penolakan H_0 dan penerimaan H_a . disimpulkan *whistleblowing system* berpengaruh positif serta sig. secara parsial terhadap pencegahan kecurangan dana desa di desa-desa Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor.

Pembahasan

Uji F

Temuan pengujian menunjukkan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan desa di Kecamatan Caringin dipengaruhi beberapa faktor kunci yaitu kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal, dan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Jelaslah elemen-elemen ini memainkan peran penting upaya memerangi penipuan dan memastikan pengelolaan yang efektif di desa. Dimana empat variabel ini sesuai dengan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pencegahan kecurangan yaitu faktor manusia, sistem dan lingkungan organisasi (Irianto, 2019).

Uji T

Berikut ini merupakan pembahasan mengenai pengaruh secara parsial antara variabel kompetensi SDM, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Secara Parsial Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian kompetensi SDM berperan penting menangkal praktik kecurangan pengelolaan dana desa secara efektif. Hal ini menyoroti pentingnya kompetensi SDM sebagai faktor kunci dalam upaya memerangi penipuan dalam pengelolaan dana desa. Kompetensi pengelolaan dana desa tentunya akan dapat menentukan keberhasilan dan alokasi dana desa serta akan dapat mendeteksi manakala terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan dari dianggarkannya dana desa maka mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Pelatihan tentang *fraud awareness* dapat dilakukan untuk memberikan gambaran kepada seluruh aparatur desa tentang *fraud* dan implikasinya serta meningkatkan kompetensi SDM dalam pencegahan kecurangan. Pelatihan *fraud awareness* ini merupakan salah satu bentuk upaya bentuk pengendalian kecurangan yang dapat terjadi di suatu organisasi atau instansi, yang menurut survei ACFE (2018) dilaksanakan sebagian besar organisasi (53%) dan dipandang mampu menekan besarnya kerugian karena tindakan kecurangan (Irianto & Novianti, 2019:82). Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparatur desa di Kecamatan Caringin diketahui bahwa pelatihan yang diadakan pemerintah dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur desa masih kurang. Selain itu, pergantian aparatur desa yang sering terjadi juga sering menjadi hambatan. Pelatihan yang kurang ini menyebabkan aparatur desa terkadang mengalami kesulitan dalam pengelolaan dana desa yang pelaporannya berbasis aplikasi yang jumlahnya cukup banyak, sehingga terkadang terjadi keterlambatan dalam pelaporan hasil pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini didukung penelitian Hamidah (2020), Islamiyah, dkk (2020) Wahyudi, dkk (2021) dan Dewi, dkk (2022) menyebutkan kompetensi SDM berpengaruh akan pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Kepemimpinan Teladan Secara Parsial Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Temuan dari penelitian ini bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, kepemimpinan teladan memiliki peranan penting dalam mencegah kegiatan kecurangan. Hal ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang patut diteladani dalam upaya memerangi kecurangan dalam

pengelolaan dana desa. Perlu diketahui bahwa moral yang ditunjukkan oleh pemimpin merupakan cerminan dari moral yang dianut oleh bawahannya, sehingga mempengaruhi etos kerja dan rasa tanggung jawabnya. Bawahan cenderung meniru perilaku yang ditunjukkan pemimpinnya (Urumsah,dkk 2016). Penting bagi pemimpin memberikan contoh positif guna menumbuhkan perilaku etis di kalangan bawahannya. Tentunya dengan perilaku etis yang ada akan dapat meminimalisir tindakan kecurangan atau hal-hal diluar norma yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparatur desa di Kecamatan Caringin diketahui bahwa pimpinan dalam hal ini kepala desa biasanya mengadakan musyawarah evaluasi kinerja tiap dua minggu sekali, guna meningkatkan kinerja dari pemerintahan desa dalam melayani masyarakat. Namun kepala desa tidak selalu dapat memberikan arahan langsung kepada bawahannya karena kesibukandan tugas ke luar wilayah. Tidak adanya arahan dan pengawasan dari pimpinan dapat berdampak terhadap adanya ketidakberaturan dalam pengelolaan dana desa dimana hal itu bisa saja menghambat tujuan dari dianggarkannya dana desa.

Hasil penelitian ini didukung penelitian Mayer, dkk (2010) Jhonson, dkk (2017) dan Domili (2021) menyatakan bahwa kepemimpinan etis dan berakhlak berpengaruh akan pencegahan kecurangan.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Secara Parsial Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Hasil pengujian sistem pengendalian internal berperan penting dalam menggagalkan aktivitas kecurangan pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem pengendalian internal dalam memerangi kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal yang baik berfungsi sebagai elemen mendasar guna mencapai manajemen yang sukses dan efisien dalam perusahaan atau organisasi mana pun, dimana pengendalian internal ini sangat diperlukan untuk meminimalkan penyelewengan atau kecerobohan yang mungkin terjadi sehingga kerugian dapat dihindari. Dari hasil survei yang diterbitkan ACFE diketahui bahwa faktor paling umum yang mendasari terjadinya tindak kecurangan adalah karena lemahnya sistem pengendalian internal yaitu sebesar 29% (ACFE, 2022). Dengan sistem

pengendalian internal yang baik ini juga diharapkan tujuan dianggarkannya dana desadapat tercapai dan segala bentuk kecurangan didalamnya dapat dicegah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparatur desa diketahui bahwa salah satu cara dalam upaya pencegahan kecurangan adalah dengan selalu menjaga komunikasi antar bagian dimana setiap informasi selalu terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Misalnya, dengan menampilkan data alokasi dana desa di papan pengumuman. Namun, dalam hal sistem pengendalian internal di beberapa desa masih terdapat pembagian tugas yang kurang merata sehingga terdapat penumpukan tugas dibagian tertentu karena minimnya kompetensi dari aparatur desa, sehingga pengelolaan dana desa menjadi kurang efektif.

Hasil penelitian didukung penelitian Hamidah (2020), dan Wahyudi, dkk (2021) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

4. Pengaruh Whistleblowing System Secara Parsial Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa

Penerapan sistem pelaporan pelanggaran mempunyai dampak yang signifikan dan bermanfaat dalam mencegah kegiatan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Dari hasil penelitian menunjukkan pentingnya peran sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) dalam memberantaskecurangan dalam pengelolaan dana desa. Sistem pelaporan pelanggaran berfungsi sebagai mekanisme pelaporan pelanggaran, perilaku tidak etis, ataupun tindakan apa pun yang dapat merugikan organisasi atau pemangku kepentingannya. Hal ini memungkinkan karyawan dan pemimpin organisasi untuk melaporkan pelanggaran tersebut kepada otoritas atau lembaga yang berwenang yang mampu mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pelanggaran tersebut. Tersedianya media pelaporan yang dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan pelapor akan dapat mendorong setiap pihak untuk melaporkan setiap tindakan kecurangan yang ada sehingga akan dapat membantu mendeteksi serta mencegah tindakan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Hasil wawancara dengan salah satu aparatur desa di Kecamatan Caringin diketahui bahwa sosialisasi berkaitan dengan pelaporan rahasia (*whistleblowing system*) masih sangat kurang, sehingga beberapa aparatur desa tidak semuanya mengetahui akan adanya media pelaporan rahasia ini.

Hasil penelitian ini diperkuat penelitian yang dilakukan Islamiyyah dkk (2020), Wahyudi dkk (2021), dan Yufitrianisa dkk (2022) yang menunjukkan penerapan *whistleblowing system* berperan penting dalam mencegah tindakan kecurangan kegiatan pengelolaan dana desa..

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah menganalisis temuan penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa kompetensi sumber daya manusia, kepemimpinan teladan, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing system* berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa, dimana besaran kontribusi pengaruhnya sebesar 82,8% yang berarti pengaruhnya sangat kuat.

Setelah menganalisis temuan penelitian ini, peneliti menawarkan serangkaian rekomendasi dan masukan bagi pemerintah dan peneliti selanjutnya. Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan pelatihan terhadap aparatur desa secara rutin dan berkelanjutan, mengingat berbagai perubahan yang terus terjadi dari segi sistem dan kebijakan terlebih dalam hal teknologi. Kemudian terkait dengan sistem pengelolaan dana desa diharapkan lebih terintegrasi antara pihak desa dan kementerian desa karena dari hasil wawancara dengan aparatur desa diketahui bahwa dana desa yang di transfer ke tiap desa tidak dapat dikelola sepenuhnya oleh desa karena harus mengikuti pola alokasi yang telah ditentukan oleh kementerian desa, hal ini menjadi hambatan karena kebutuhan tiap-tiap desa itu berbeda sehingga terkadang pengalokasian dana desa cenderung tidak tepat sasaran. Selain itu, sosialisasi mengenai sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) juga perlu ditingkatkan, dan mendorong upaya kolektif untuk mencegah dan melaporkan adanya kecurangan pengelolaan dana desa.

Kemudian untuk meningkatkan efektivitas pencegahan kegiatan kecurangan pengelolaan dana desa, disarankan agar peneliti selanjutnya menggali faktor-faktor tambahan yang mungkin berdampak pada masalah ini. Misalnya, menyelidiki potensi dampak insentif terhadap aparat desa dapat memberikan wawasan yang bermanfaat lebih. Dengan melakukan hal ini, manfaat pencegahan penipuan dapat dimaksimalkan dan mengurangi terjadinya perilaku kecurangan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- ACFE. (2022). *Occupational Fraud 2022 : A Report To The Nation*. ACFE.
- Ahdiat, A. (2023, Juli 4). *Dana Desa Bertambah Setiap Tahun, Tapi Turun Pada 2022*. Diterima dari : <https://Databoks.Co.Id/Datapublish/2023/07/04/Dana-Desa-Bertambah-Setiap-Tahun-Tapi-Turun-Pada-2022>
- Basuki, N. (2021). Perilaku Kepemimpinan Yang Melayani : Studi Kasus Alumni PKP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020. *Jurnal Inovasi Aparatur*, 3(1), 269-281.
- Dewi, L. P., Sunarya, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9, 327-340.
- Domili, A. R. (2021). *Peran Kecerdasan Spiritual, Akhlak Pimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Studi Kasus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Utara*. Yogyakarta: Fakultas Bisnis Dan Ekonomika. Universitas Islam Indonesia.
- Hamidah. (2020). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Moralitas Individu Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dana Desa Berdasarkan Perspektif Aparatur Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kabupaten Sukabumi)*. Bogor: Universitas Djuanda.
- Hutahean, W. S. (2021). *Filsafat Dan Teori Kepemimpinan*. Malang: Ahli Media Pers.
- Indonesia, D. (2023, Maret 20). *ICW : Korupsi Paling Banyak Terjadi Di Desa Pada 2022*. Diterima dari [Http://DataIndonesia.Id/Ekonomi/Detail/ICW](http://DataIndonesia.Id/Ekonomi/Detail/ICW)
- Irianto, G., & Novianti, N. (2019). *Dealing With Fraud*. Malang: Ub Press.
- Islamiyyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal*

- Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1-13.
- Johnson, E. N., Kidwell, L. A., Lowe, D. J., & Reckers, P. M. (2017). Who Follows The Unethical Leaders ? The Association Between Followes Personal Characteristic and Intention to Comply in Commmiting Organizational Fraud. *J Bus Ethic*.
- Kementrian Keuangan. (2021, 3 31). *Dana Desa : Pengertian, Sumber Dana, Penyaluran Dana, dan Prioritasnya*. Diterima dari : <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/bukit-tinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran,-dan,-prioritasnya>
- Mayer, D. M., Kuenzi, M., & Greenbaum, R. L. (2010). Examining The Link Between Ethical Leadership and Employee Misconduct : The Mediating Role Of Ethical Climate. *Journal Of Business Ethics*, 95, 7-16.
- Pranitasari, D., Setianingsih , W., Prastuti, D., Hermastut, P., & Saodah, E. S. (2022). Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kompensasi, Dan Lingkungan Kerja Terhadap Keterikatan Kerja. *Jurnal Inovasi Aparatur*, 4(1), 373-383.
- Setiadiputra, R. P. (2019). Peranan Pengembangan Kompetensi Pelaporan Pengelolaan Keuangan Berbasis AkruaI Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Inovasi Aparatur*, 1(1), 39-45.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Urumsah, D., Wicaksono, A. P., & Pratama, A. J. (2016). Melihat Jauh Ke dalam : Dampak Kecerdasan Spiritual Terhadap Niat Melakukan Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20(1), 47-55.
- Wahyudi, S., Achmad, T., & Pamungkas, I. D. (2021). Village Apparatus Competence, Individual Morality, Internal Control System, and Whistleblowing System on Village Fund Fraud. *WSEAS TRANSACTION on ENVIRONMENT and DEVELOPMENT*, 17, 672-684.
- Wonar, K., Falah, S., & Pengayow, B. J. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Ketaatan Pelaporan Keuangan Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moral Sensitivity Aevagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, 1(2), 63-89.
- Yufitrianisa, Wahyuningsih, E., Apriliani, M., Shaddiq, S., Zulkarnain, I., & Anggraini, N. (2022). The Influence Of Human Resorces and Marketing Competence, Morality, Whistleblowing and Internal Control System On The Prevention of Fraud In Village Financial Management in Karimun Regency. *International Journal of Latest Technology in Engginering, Management & Applied Science*, 1-7.